

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2011. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, edisi revisi, Malang: Media Nusa Creative.
- Delik. <https://kbbi.web.id/delik> diakses pada 27 September 2020.
- Djamali, R. Abdoel. 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Junaedi. 2015, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hajri, Wira Atma. 2015, *Putusan Kontroversial MK*. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10827> diakses pada 8 Oktober 2020.
- Hamzah, Andi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: Softmedia.
- Hamzah, Chandra M. 2014, *Penjelasan Hukum Mengenai Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Hiariej, O.S. Eddy. 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- KPK. 2017, *Mengenai Gratifikasi*. <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi> diakses pada 19 Juli 2021.
- Lamintang, P.A.F. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, edisi kelima, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

- Mys/CRD. 2008, *Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum/> diakses pada 6 Oktober 2020.
- Nofriandi, Pepy. 2017, *Mahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2847/mahkamah-agung-dalam-dinamika-perubahan> diakses pada 9 Oktober 2020.
- Pangaribuan, Ridho. 2017, *Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/> diakses pada 25 September 2020.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus. <http://www.pn-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 22 Februari 2021.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/perkap-nomor-6-tahun-2019-tentang-penyidikan-tindak-pidana-1.pdf>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/perma\\_4\\_2016\\_upload.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_4_2016_upload.pdf)
- Pompe, Sebastiaan, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, edisi pertama, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2020, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada 18 Agustus 2021.
- Putusan Praperadilan No.11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.
- Redaksi, *Arti Edaran*. <https://lektur.id/arti-edaran/> diakses pada 10 Oktober 2020.
- Redaksi, *Arti Korupsi*. <https://lektur.id/arti-korupsi/> diakses pada 19 Juli 2021.
- Redaksi, 2017. *Macam-Macam Delik*. <https://pengacaranasional.co.id/artikel/macam-macam-delik/> diakses pada 4 Oktober 2020.

- Redaksi. 2019. *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. <https://doktorhukum.com/asas-asas-penting-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses pada 25 September 2020.
- Redaksi. 2019, *Mengenal Hak-Hak Tersangka & Terdakwa Dalam Perkara Pidana*. <https://www.doktorhukum.com/mengenal-hak-hak-tersangka-terdakwa-dalam-perkara-pidana/> diakses pada 8 Oktober 2020.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sibuea, Hotma P. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Soerjowinoto, Petrus. 2015, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=6272](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=6272)
- Tim Visi Yustisia. 2014, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Visimedia.
- Tugas Pokok dan Fungsi*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 9 Oktober 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHPA.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35770/UU%20Nomor%2014%20Tahun%201985.pdf>
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33263/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202001.pdf>

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28610/UU%2012%20Tahun%202011.pdf>

Wawancara dengan Hakim Hariyadi S.H., M.H selaku Hakim Tunggal dalam perkara nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL pada 24 Mei 2021.

Yasin, Muhamad. 2013, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/> diakses pada 10 Oktober 2020.

